

## DAFTAR ISI

### Menimbang Birokrasi, Partai, dan Politik di Indonesia

1. Ekonomi-Politik Kebijakan Impor Garam Indonesia  
Periode 2007-2012  
*Lukman Baihaki* 1-16
2. Etnisitas sebagai Instrumen Politik dan Keamanan  
di Kalimantan Barat Pasca Rezim Orde Baru  
*Jumadi, Mohammad Rizal Yakoop* 17-34
3. Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia  
*Gonda Yumitro* 35-50
4. Membongkar *Veto Player*  
dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014  
*Arya Budi* 51-66
5. Menimbang Media Sosial dalam *Marketing* Politik di Indonesia:  
Belajar dari Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012  
*Wisnu Prasetya Utomo* 67-84
6. Mereformasi Birokrasi dari Perspektif Sosio-Kultural:  
Inspirasi dari Kota Yogyakarta  
*Erisandi Arditama* 85-100

## Etnisitas sebagai Instrumen Politik dan Keamanan di Kalimantan Barat Pasca Rezim Orde Baru

Jumadi<sup>1</sup>  
Mohammad Rizal Yakoop<sup>2</sup>

### Abstract

*Political changes of the New Order regime have an impact on the dynamics of local politics in West Kalimantan. These changes raise complex issues related to ethnic and religious issues in the rivalry between Dayak and Malay elite. Therefore, this article aims to study the ethnic as an instrument of politics post New Order regime 1999-2008 case West Kalimantan and link into political representation and the community security by utilizing qualitative approach. In addition, the data for this study is based on primary and secondary data. The primary data obtained through in-depth interviews with selected informants. While the secondary data obtained from books and journals. This writing used the conceptual framework of Jack Snyder (2000) about democratizing states and ethnic nationalism and Ted Robert Gurr (1994) on ethno politic and instrumentalism approach. The study found some important factors that influence the emergence of identity politics in West Kalimantan, namely structural factors, political conditions, unbalanced representation of political and ethnic stereotypes. However, political factors and unbalanced ethnic representation in power are the main causes of the emergence of identity politics in West Kalimantan. The results also show that the occurrence of ethnic identity politics and religion has influence on the shape of political representation and community security.*

### Keywords:

*Ethnicity; instrument of politics; security.*

### Abstrak

Perubahan politik dalam rezim Orde Baru telah memberi pengaruh terhadap dinamika politik di Kalimantan Barat. Masalah ini menimbulkan permasalahan kompleks berkaitan dengan isu etnis dan agama dalam persaingan antara elit Dayak dan Melayu. Artikel ini bertujuan mengkaji etnis sebagai instrumen politik dan keamanan di Kalimantan Barat, pasca rezim Orde Baru, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam kajian ini berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui kaidah temu bual mendalam dengan informan terpilih, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal. Tulisan ini menggunakan kerangka konsep Jack Snyder (2000) tentang *democratizing states* dan *ethnic nationalism*, dan Ted Robert Gurr (1994) tentang *ethnopolitic* dan pendekatan instrumentalisme. Kajian ini mengidentifikasi beberapa faktor penting yang

<sup>1</sup> Staf Pengajar FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat. Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian Tesis Doktoral yang berjudul "*Perwakilan Politik Berasaskan Etnik dan Agama sebagai Instrumen Politik dan Keselamatan Komuniti: Kes Kalimantan Barat 1999-2008*", pada Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan (FSSK) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Penulis dapat dihubungi melalui jum\_untan@yahoo.co.id.

<sup>2</sup> Prof. Madya dan Dosen sains politik di Pusat Pengajian Sejarah, Politik, dan Strategi, Fakultas Sains Sosial dan Kemanusiaan (PPSPS, FSSK), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Bangi. Dapat dihubungi melalui rizaly@ukm.my.

mempengaruhi munculnya politik identitas di Kalimantan Barat, antara lain faktor struktural, keadaan politik, ketidakberimbangan perwakilan politik, dan stereotip etnis. Bagaimanapun, faktor keadaan politik dan ketidakberimbangan perwakilan etnis dalam kekuasaan adalah penyebab utama munculnya politik identitas di Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya politik identitas etnis, selain itu agama juga berpengaruh kepada bentuk keterwakilan politik dan keamanan komunitas.

### **Kata Kunci:**

etnisitas; instrumen politik; keamanan.

### **Pendahuluan**

Berakhirnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, politik Indonesia memasuki era baru yaitu demokratisasi. Wujud dari semakin demokratisnya sistem politik tersebut ditandai dengan pulihnya hak-hak politik rakyat, penguatan peran partai politik, pelaksanaan Pemilihan Umum yang demokratis, revitalisasi peran dan fungsi lembaga legislatif, kebebasan pers, dan diberlakukannya otonomi yang luas kepada pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah pada awal reformasi, dalam praktiknya, memang membawa dampak yang cukup signifikan bagi dinamika politik di tingkat daerah. Eksistensi masyarakat daerah, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan proses rekrutmen kepemimpinan di daerah, khususnya dalam pemilihan kepala daerah telah menunjukkan perkembangan yang berbeda, jika dibandingkan dengan masa kekuasaan Orba. Aktor, institusi, dan budaya lokal pun bermunculan kembali, serta mulai memainkan peranan dalam politik lokal. Aktor-aktor lokal yang terorganisir dalam institusi adat dan partai politik menjadi salah satu kekuatan baru dalam dinamika politik lokal. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang memberikan kekuasaan dan kewenangan politik yang begitu besar kepada masyarakat di daerah, pada realitanya juga memunculkan sebuah fenomena politik identitas yang berasaskan etnis dan agama. Proses politik dan rekrutmen kepemimpinan di daerah selama sepuluh

tahun terakhir ini lebih cenderung didasarkan pada asal-usul daerah, etnis, dan agama.

Fakta menunjukkan bahwa proses rekrutmen kepemimpinan di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pasca rezim Orba, tidak hanya mengarah pada tuntutan "putra daerah" akan tetapi makin meluas pada penggunaan identitas etnis dan agama. Dalam banyak kasus pemilihan kepala daerah, seperti gubernur dan bupati, politik identitas yang didasarkan pada etnis dan agama merupakan asas legitimasi dalam struktur politik pada level lokal.<sup>3</sup> Potensi konflik dalam interaksi antar kelompok etnis yang bersaing sangat jelas ketika berhubungan dengan masalah kekuasaan dan kepemimpinan politik. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Kalimantan Barat selama sepuluh tahun terakhir memberikan gambaran semakin menguatnya politik identitas.

Demokratisasi politik di ranah lokal dalam waktu sepuluh tahun ini menyebabkan persaingan untuk memperebutkan kekuasaan politik menjadi makin keras. Mobilisasi jaringan

---

<sup>3</sup> Hasil Survey LSI termuat dalam laporan penelitian LSI edisi 9 Januari 2008 dan edisi 10 Februari 2008 menunjukkan, bahwa masih kuatnya sentimen etnis dalam pemilihan pejabat publik di Kalimantan Barat. Sentimen etnis ini diukur dengan mempertanyakan kepada responden, apakah menurut mereka agama dan etnis para kandidat merupakan faktor yang diutamakan ketika dalam memilih? Sebanyak 56,4 persen menyatakan mempertimbangkan faktor agama dan etnis.

kekerabatan, etnis, dan keagamaan kemudian diciptakan untuk memenangkan persaingan politik tersebut. Di Kalimantan Barat, setiap pemilihan kepala daerah selalu mempertimbangkan keterwakilan etnis dan agama, sehingga *power sharing* antara kelompok etnis dominan selalu mewarnai setiap proses pemilihan kepemimpinan politik. Pertimbangan-pertimbangan unsur suku dan agama tersebut dalam praktiknya tidak hanya pada jabatan-jabatan politik saja, akan tetapi juga meluas pada jabatan-jabatan di birokrasi pemerintahan. Besar kecilnya kemampuan kelompok etnis dalam mendapatkan kekuasaan politik dan kepemimpinan di birokrasi pemerintahan dianggap berimplikasi pada keamanan masyarakatnya (*community security*).

Sebagai daerah yang masyarakatnya cukup majemuk dan seringkali dilanda konflik sosial, fenomena politik identitas dan keterwakilan politik yang didasarkan pada etnis dan agama dalam proses politik di Kalbar pasca rezim Orba, cukup menarik untuk dikaji. Berkenaan dengan penjelasan di atas, maka tulisan ini membahas dua masalah: faktor-faktor apakah yang menyebabkan munculnya politisasi etnis dan agama? Apa pengaruhnya terhadap keamanan masyarakat?

### Metodologi

Penelitian ini, selain kajian literatur, juga menekankan pada penelitian lapangan. Berdasarkan fakta-fakta lapangan yang terkumpul dibuat generalisasi empiris tentang fenomena politik identitas etnis dan agama yang mengemuka dalam setiap pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Barat. Jenis penelitian dalam kajian ini termasuk *eksploratory* yaitu penelitian yang dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang sesuatu yang relatif baru, ditujukan untuk kepentingan pendalaman lanjutan (Babbie dan Benaquisto, 2010: 80). Kajian ini juga menggunakan analisis yang

sifatnya bertema (*thematic*) mengacu kepada masalah yang bersifat spesifik yaitu etnisitas, keterwakilan politik, dan keamanan komunitas.

Data dalam penelitian ini meliputi data primer dalam bentuk wawancara mendalam dan terbuka (*open ended interview*) dengan informan, data sekunder didapat dari artikel, buku, serta dokumen. Kaidah penentuan sumber untuk mendapatkan orang yang akan diwawancara dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih berdasarkan pada pertimbangan dan tujuan dari penelitian ini. Untuk mendapatkan validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen yang diperoleh. Membandingkan pendapat pada saat dilakukan penelitian dengan situasi yang pernah terjadi dengan pendapat antara tokoh adat, tokoh masyarakat, dan politisi.

### Kerangka Teoretis

Kata etnis menjadi suatu predikat terhadap identitas seseorang atau kelompok. Menurut Shamsul (2000: 1), istilah identitas pada umumnya mempunyai dua pengertian: pertama merujuk pada identitas individu, dan kedua, bersifat identitas kolektif. Oleh karena itu, ada anggapan dalam masyarakat bahwa setiap individu itu dilahirkan berbeda-beda dan memiliki ciri serta wataknya sendiri. Seseorang tidak bisa menolak menjadi Afrika, Madura, Papua, atau menjadi Cina, sekaligus juga tidak boleh meminta menjadi Jawa, Batak, atau Melayu. Predikat tersebut menjadi suatu yang *taken for granted* sejak awal mula penciptaannya. Etnisitas merupakan kategori-kategori yang diterapkan pada kelompok atau kelompok orang yang dibentuk dan membentuk dirinya dalam kebersamaan atau kolektivitas (Rex, 1993: 8).

Lake dan Rothchild (1998: 5-6) mempunyai perspektif yang berbeda dalam melihat etnisitas. Mereka melihat etnisitas dengan cara pandang yang instrumentalis. Etnisitas merupakan label yang memberi hubungan simbol untuk kepentingan politik. Pandangan ini mempunyai persamaan dengan keanggotaan di dalam partai politik. Dalam perspektif yang sama, Jacques Bertrand (2004: 57-59) mengatakan bahwa kekerasan komunal etnis merupakan konjungtur kritis (*critical junctures*) bagi upaya memperbaiki relasi kekuasaan dan sumber daya. Setiap perubahan struktur pada lembaga politik kenegaraan akan berkontribusi pada polarisasi identitas etnis, agama, dan kelompok politik yang potensial memunculkan kekerasan. Oleh karena itu, menurut Bertrand (2004), pendekatan “instrumentalis” yang fokus pada peran elit dalam memobilisasi identitas etnis berpendapat bahwa, etnisitas seringkali menjadi saluran bagi arus konflik dan perjuangan politik, pemimpin, dan para aktor politik untuk memobilisasi dukungan massa, dalam usahanya bersaing dalam memperebutkan kekuasaan politik.

Membahas etnisitas dalam konteks politik juga sangat penting untuk memahami konsep identitas, karena etnisitas sesungguhnya mampu membangun sebuah identitas kelompok. Secara umum, identitas diartikan sebagai citra yang membedakan suatu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya, dibangun oleh individu atau kelompok tersebut, dan dimodifikasi secara terus-menerus melalui interaksi dengan pihak-pihak lain (Katzenstein, 1996: 59). Sedangkan perspektif konstruksi sosial memberikan pandangan bahwa, pembentukan identitas sebagai suatu fenomena sosial yang dapat dipahami dengan melihat dua realita sosial, yaitu realita *authority-defined* dan realita sosial *everyday-defined*.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Shamsul A.B. (1996). *Debating About Identity in Malaysia: A Discourse Analysis*. Southeast Asian Studies, hlm. 34.

Identitas sebagai konstruksi sosial menurut Berger (1966) adalah suatu elemen kunci realita subjektif yang berada dalam suatu hubungan *dialectical* dengan masyarakat.<sup>5</sup> Identitas merupakan bentuk dari proses sosial, dan di dalamnya akan terbentuk identitas yang nantinya menentukan struktur sosial. Hal senada dijelaskan pula oleh Alcoff dan Mohanty, Rosaldo, Siebers (2006)<sup>6</sup>, dan Gupta (2007)<sup>7</sup> bahwa identitas politik sesungguhnya juga merupakan proses konstruksi sosial.

Secara konseptual, identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik seperti kelas, gender, ras, seksualitas, dan etnisitas. Sedangkan politik identitas lebih mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas, baik itu identitas politik maupun sosial, sebagai sumberdaya dan instrumen politik.<sup>8</sup> Menurut Beyme (1996:118), tindakan politik identitas pada hakikatnya

<sup>5</sup> Belger, Peter L. dan Luckmann, Thomas. (1966). *The Social Construction of Reality A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Penguin Books Australia. Menurut Berger, *identity is a phenomenon that emerges from the dialectic between individual and society. Identity types, on the other hand, are social products tout court, relatively stable elements of objective social reality* (hlm. 195). Berger dan Luckmann kemudian menjelaskan bahwa terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivitas, dan internalisasi. Sedangkan yang dimaksud Berger sebagai realita sosial adalah pengetahuan yang bersifat keseharian, hidup, dan berkembang dalam masyarakat seperti konsep, kesadaran, dan wacana publik sebagai hasil dari konstruksi sosial. Realita sosial terdiri dari realita objektif, simbolik, dan subjektif. Realita tersebut dikonstruksi pula melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

<sup>6</sup> Tulisan mereka tentang identitas politik dapat dilihat dalam Alcoff, Linda Martin dan Satya P. Mohanty (ed). (2006). *Identity Politics Reconsidered*. New York: Palgrave Macmillan.

<sup>7</sup> Gupta, Suman. (2007). *Social Constructionist Identity Politics and Literary Studies*. New York: Palgrave Macmillan.

<sup>8</sup> Pembahasan lebih lanjut terkait dinamika interaksi antara identitas sosial dan politik sebagai sumber

adalah suatu gerakan sosial yang ingin mengubah keadaan masyarakatnya.<sup>9</sup> Namun, dalam perkembangan berikutnya, politik identitas justru dimanfaatkan suatu kelompok mayoritas untuk memperkuat dominasi kekuasaannya.

Menurut Ted Robert Gurr (1993), mobilisasi dan strategi elit etnis selalu berdasarkan interaksi dua faktor yaitu, reaksi emosional dan hasil kalkulasi politik strategis. Selain itu, ada empat faktor yang sangat menentukan intensitas kekecewaan dan potensi kelompok etnis melakukan aksi politik. Pertama, besarnya tingkat keterbelakangan atau penderitaan kolektif suatu kelompok komunal jika dibandingkan dengan kelompok lain. Kedua, kuatnya perasaan identitas kelompok. Ketiga, derajat kohesi dan mobilisasi kelompok, dan terakhir adalah kontrol represif oleh kelompok-kelompok dominan.

Pendekatan yang cenderung instrumentalis melihat, kebutuhan akan definisi identitas etnis dalam politik bersifat material atau bertujuan memperoleh kekuasaan. Pandangan instrumentalis lainnya adalah Paul Brass (1979) tentang peranan elit dalam kelompok yang memanipulasi simbol identitas etnis dan

John Breuilly (1993)<sup>10</sup> dengan teori politiknya mengenai terbentuknya nasionalisme.

Pendekatan ini memberi sumbangsih untuk memahami politik identitas. Secara teoretis, pendekatan ini menjelaskan persaingan kelompok etnis dalam politik. Para pemimpin etnis seringkali menggunakan kelompok budaya sebagai instrumen untuk memobilisasi massa dalam persaingan politik.<sup>11</sup> Sehingga, pandangan instrumentalis tentang etnisitas seperti yang dijelaskan oleh Barth (1969)<sup>12</sup>, Banton (1983), Brass (1996), Hartmann dan Cornell (1998), dan Smith (2001), menjadikan masalah yang berhubungan dengan kepentingan sosial, politik, dan sumber budaya sebagai hal penting karena berhubungan dengan penguasaan dan status sebuah kelompok etnis. Menurut perspektif instrumentalis, etnisitas muncul sebagai hasil interaksi yang berkelanjutan antara keadaan alami suatu

---

konstruksi politik identitas, dapat ditemukan dalam dua buku Martin yaitu Alcoff, Linda Martin. (2003). *Identities: Modern and Postmodern*. Dan buku yang kedua, Alcoff, Linda Martin., and Mendieta, E. (eds). *Identities: Race, Class, Gender, and Nationality*. Malden-MA: Blackwell Publishing.

<sup>9</sup> Beyme, Klaus von. (1996). *Biopolitical Ideologies and Their Impact in The New Social Movements*.

Dalam *Biopolitic, The Politics of The Body, Race and Nature*, Agnes Heller dkk (eds). Brookfield, USA: Avebury, Beyme membuat karakteristik pola gerakan politik identitas yaitu: *Pertama*, gerakan politik identitas, yang pada dasarnya membangun kembali narasi besar yang prinsipnya mereka tolak dan membangun suatu teori yang mengendalikannya faktor-faktor biologis sebagai penyusun perbedaan-perbedaan mendasar dalam realita kehidupannya. *Kedua*, dalam gerakan politik identitas ada kecenderungan tertentu untuk membangun sistem *reversed apartheid*.

<sup>10</sup> Breuilly, John. (1993). *Nationalism and the State* (Edisi ke-2). Manchester: Manchester University Press. Breuilly tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa identitas budaya merupakan karakteristik bagi penentu nasionalisme. Menurutnya, nasionalisme boleh jadi merupakan argumen yang dipakai sub-elit untuk memobilisasi rakyat, mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang berbeda di antara kelompok sosial, dan mengabsahkan tindakan mereka dalam rangka mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di negara modern.

<sup>11</sup> Smith, Anthony D. (2001). *Nationalism, Theory, Ideology, History*. Oxford, UK: Published by Arrangement with Blackwell Publishing Ltd.

Pendekatan instrumentalis muncul sekitar tahun 1970-an di Amerika Serikat, dalam perdebatan mengenai dominasi etnis (kulit putih) di negara yang seharusnya menjadi negara multietnis. Hal ini memicu perdebatan sengit sepanjang dekade 1960 dan 1970-an mengenai sejauh mana kelompok kepentingan atau penekan yang berperilaku instrumental dalam politik.

<sup>12</sup> Barth dalam bukunya *Ethnic Groups and Boundaries* (1996: 36), mengemukakan bahwa bentuk tatanan kelompok etnis sangat bervariasi, begitu juga hubungan antar etnis. Dalam konteks kontemporer, kegiatan-kegiatan politik dalam kelompok etnis merupakan cara baru untuk memunculkan perbedaan suku dan budaya, serta untuk mengartikulasikan kepentingan kelompok etnis yang terdiktomi.

komunitas lokal, peluang-peluang ekonomi, dan politik yang ada. Berdasarkan perspektif ini, manusia dilihat sebagai agen yang secara aktif membuat pilihan, yang secara strategis mempersembahkan dan menonjolkan lambang-lambang etnisnya dengan cara yang mereka anggap sesuai (Yancey dalam Fauzi, 2004). Kajian yang dilakukan oleh Gurr (1993: 42) pun menunjukkan masalah ketidakadilan atau ketidakseimbangan yang muncul pada keterwakilan politik dan budaya dalam partai politik, parlemen, dan pemerintahan. Hal itu mengemuka sebagai salah satu faktor penting yang dapat menimbulkan sentimen etnis dalam politik, sehingga identitas sosial dan budaya bisa menjadi instrumen penting dalam membangun politik identitas yang berdasarkan etnis dan agama.

Etnisitas merupakan jenis perpecahan yang paling sulit dikendalikan oleh demokrasi dan terkadang berimplikasi terhadap keamanan komunitas etnis. Konsep keamanan komunitas sebenarnya adalah bagian dari *human security* sebagaimana dijelaskan Human Development Report UNDP 1994 dalam Tadjbakhs dan Cheney (2007: 16), bahwa keamanan komunitas dipahami sebagai munculnya ancaman dalam kemajemukan budaya yang menuntut adanya keamanan dari penindasan, kekerasan, dan diskriminasi etnis. Perihal keamanan komunitas apabila diaplikasikan pada konteks persaingan politik identitas, dipahami sebagai suatu keadaan telah terintegrasinya berbagai kelompok dalam masyarakat, dengan tingkat responsif dan solidaritas yang tinggi, tetap terjaminnya kebebasan, tidak adanya intimidasi politik, dan terakomodasinya kepentingan sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

### **Pentingnya Isu Etnis dan Agama dalam Kepemimpinan Politik Lokal**

Sebagai etnis mayoritas, Dayak dan Melayu tak hanya menjadi bagian terpenting bagi pemerintah pusat dalam pengaturan politik di Kalbar, seringkali tetap dihadapkan pada persaingan politik berdasarkan simbol-simbol etnis. Kedua etnis tersebut merasa sebagai penduduk asli Kalbar yang berhak menduduki berbagai posisi penting, misalnya pemimpin partai politik, anggota DPRD, kepala daerah, dan jabatan lainnya di birokrasi pemerintah daerah. Dalam catatan sejarah kepemimpinan di daerah, secara sosial dan politik orang-orang Melayu memang lebih dominan, karena para sultan dan raja yang pernah berkuasa di daerah-daerah kabupaten dan kota di Kalbar mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok etnis Melayu.<sup>13</sup>

Orang-orang Dayak seringkali merasa bahwa selama masa kepemimpinan sultan atau raja Melayu ketika penjajahan Belanda, mereka diperlakukan diskriminatif. Sebagai penduduk asli sekaligus mayoritas, mereka merasa tidak memiliki hak yang sama dengan orang-orang Melayu. Mereka tidak diperbolehkan bekerja dilingkaran penting kesultanan, sehingga secara sosial dan politik merasa termarginalkan. Berbeda keadaannya dengan orang-orang Melayu yang secara sosial dan politik mendapat posisi jauh lebih baik (Tanasaldy, 2007).

<sup>13</sup> Di Kalimantan Barat istilah Melayu seringkali merujuk kepada orang-orang Sumatera dan Semenanjung Malaysia, mereka pada masa lalu datang ke Kalbar untuk berdagang dan mengajarkan agama Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, orang-orang Dayak yang masuk agama Islam pun disebut sebagai orang Melayu. Di pedalaman Kalimantan Barat, orang Dayak yang masuk Islam mereka sebut dengan *Senganan*, yaitu kelompok masyarakat asli yang telah mengalami asimilasi dengan orang-orang Melayu melalui perdagangan dan kemudian menerima Islam menjadi agamanya. Di Kalbar setidaknya terdapat dua belas Kerajaan/Kesultanan Melayu yang pernah berkuasa.

Berkuasanya rezim Orde Baru, sesungguhnya menjadi sesuatu yang paling menyakitkan bagi masyarakat lokal, khususnya etnis Dayak. Namun, dengan berbagai cara mereka tetap berupaya membangun kesadaran etnisitas di dalam komunitasnya. Dalam rentang waktu yang panjang, masyarakat Dayak makin berusaha menguatkan identitas etnisnya dengan mempertentangkan perbedaan antara etnis Dayak dengan etnis yang lain. Kontestasi ini terutama dihadapkan dengan etnis Melayu, etnis yang dianggap sebagai pendatang, memiliki kekuasaan yang lebih dominan dan beragama Islam.

Meski demikian, kekuatan militer yang dominan pada masa Orba bisa meminimalisir kontraksi etnis yang dibangun oleh tokoh-tokoh Dayak tersebut. Pendekatan negara yang berbasis stabilitas dan keamanan menekan berkembangnya berbagai simbol etnis dan budaya, yang merupakan kearifan lokal masyarakat Dayak dan Melayu. Rezim Orba membuat kebijakan kebudayaan yang mempercepat terserapnya budaya daerah oleh kebudayaan nasional, yang dilatarbelakangi oleh semangat untuk menciptakan uniformitas budaya.

Orde Baru sesungguhnya merupakan masa kontemplasi dan konsolidasi bagi tokoh-tokoh Dayak untuk membangun kekuatan di bidang pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi kerakyatan. Dalam waktu dua puluh tahun lebih itu, mereka berusaha semakin menguatkan identitas etnis mereka dengan menunjukkan perbedaan antara Dayak dengan Melayu. Mereka mengidentifikasi dirinya sebagai nonmuslim, penduduk asli, mayoritas, tapi dimarginalkan sekaligus dijajah oleh pemerintah pusat dan orang-orang Melayu. Mereka mendirikan berbagai organisasi sosial-politik dan ekonomi untuk memberdayakan kelompok etnisnya.

Dalam tempo dua belas tahun kemudian, pemberdayaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Dayak dan sejumlah *Non Government Organization* (NGO), yang didirikan oleh kelompok muda Dayak terpelajar, telah berhasil bertransformasi menjadi suatu gerakan sosial dan politik.<sup>14</sup> Gerakan seperti yang dilakukan oleh kalangan intelektual Dayak tersebut tidak terjadi dalam komunitas Melayu, walaupun pada dasarnya orang-orang Melayu juga merasakan dampak dari politik rezim Orba yang otoriter dan cenderung represif.

Selama Orba, tidak ada NGO yang didirikan oleh orang-orang Melayu, yang secara spesifik melakukan pemberdayaan pada masyarakat Melayu itu sendiri. Tokoh-tokoh Melayu banyak yang menduduki posisi strategis seperti pemimpin dan pengurus partai politik, anggota DPRD, pejabat birokrasi pemerintah daerah, dan pimpinan di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan (ORMAS) yang didirikan Golkar dan militer. Mereka berpandangan bahwa cara dan langkah politik tersebut adalah bagian dari partisipasi mereka untuk memperjuangkan nasib orang-orang

<sup>14</sup> Dalam upaya memberdayakan komunitas etnis Dayak secara sosial, ekonomi, dan politik, sekumpulan orang-orang Dayak terpelajar yang dipimpin oleh A.R. Mecer pada tahun 1981 mendirikan sebuah lembaga sosial Yayasan Karya Sosial Pancur Kasih (YKSPK). Yayasan ini selain mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, juga menumbuhkan lembaga keuangan yang diberi nama Credit Union (CU). Lembaga keuangan ini berkembang signifikan dan menjadi salah satu motor pemberdayaan ekonomi kerakyatan masyarakat Dayak. Tahun 1991, para tokoh muda terpelajar Dayak mendirikan *Institute of Dayakology Research and Development* (IDRD). Lembaga riset ini fokus kepada penyelidikan, pelestarian, pendokumentasian, dan revitalisasi budaya Dayak. Awal mula pendirian, IDRD mendapat bantuan keuangan dari Konferensi Waligereja Indonesia (organisasi uskup-uskup di Indonesia) yang berpusat di Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya, lebih banyak lagi NGO-NGO yang didirikan. Semua NGO tersebut beraktivitas memberdayakan masyarakat Dayak dan mendapat dukungan keuangan dari keuskupan dan NGO-NGO internasional.

Melayu di Kalbar.<sup>15</sup> Membangun hubungan politik layaknya simbiosis mutualisme dengan pemerintah dan militer merupakan pilihan politik yang lebih baik, ketimbang melakukan gerakan politik yang berbeda pandang dengan penguasa Orba.

Dilaksanakannya otonomi daerah, yang memberikan ruang untuk melakukan pembentukan daerah-daerah kabupaten baru di Kalbar, telah mempengaruhi semakin munculnya politik identitas. Berbagai gerakan yang menginginkan pembentukan daerah otonom baru tidak sekadar untuk kepentingan perbaikan administrasi dan pelayanan publik saja, akan tetapi seringkali berhubungan dengan kepentingan elit-elit yang mengatasnamakan identitas kelompok etnis mayoritas di daerah tersebut. Di era reformasi saat ini, semua faktor politik seringkali dihubungkan dengan etnis oleh dua kelompok utama, yaitu Melayu dan Dayak. Politik identitas berdasar etnis dan agama menjadi faktor determinan bagi elit lokal untuk mendapatkan kekuasaan.<sup>16</sup> Persaingan-persaingan yang didasarkan pada etnis dan agama dalam politik lokal,

antara elit politik yang berada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Kalbar saat ini tidak lagi bersifat laten, tetapi sudah sangat terbuka. Simbol-simbol dan isu etnis dan agama menjadi sangat penting dalam setiap pemilihan kepala daerah, penentuan jabatan di birokrasi pemerintahan daerah, penentuan pimpinan partai politik, dan hal-hal yang terkait dengan kepentingan politik lainnya. Cara ini dianggap mampu menjamin kepentingan dan masyarakat bisa dimobilisasi untuk memberikan dukungan kepada elitnya, guna mendapatkan kekuasaan di daerah.

Keberhasilan tujuh orang tokoh etnis Dayak menjadi bupati dan lima wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2005, dari dua belas kabupaten yang ada di Kalbar, serta terpilihnya Cornelis sebagai Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2007, merupakan sukses besar bagi tokoh-tokoh Dayak dalam merajut isu-isu etnis dan agama, ketidakadilan dan marginalisasi sebagai instrumen politik dapat membangkitkan kesadaran sosial dan politik masyarakat Dayak. Jargon-jargon politik yang sifatnya membangun kesadaran kelompok etnis yang dijadikan simbol perjuangan politik Cornelis memang menjadi magnet politik yang kuat untuk membangkitkan kesadaran etnis dalam politik, hal inipun dianggap oleh masyarakat Dayak sebagai kejayaan politik setelah hampir selama 41 tahun tidak diberikan kesempatan untuk menjadi gubernur di Kalbar.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Pada rezim Orba, banyak organisasi-organisasi sayap yang mereka dirikan. KOSGORO (Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong), MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong), dan SOKSI (Sentral Organisasi Karya Seluruh Indonesia) yang merupakan kelompok utama dari pendukung partai Golkar dan menjadi pilihan orang-orang Melayu untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam politik. Kemudian banyak juga orang-orang Melayu yang menjadi anggota dan aktivis organisasi kepemudaan yang dibentuk militer dan partai Golkar, seperti FKPP, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, KNPI, AMPI, dan masih banyak lagi organisasi-organisasi keagamaan yang lainnya.

<sup>16</sup> Menurut Dr. H. Haitami Salim tokoh agama, tokoh masyarakat Melayu dan ketua Forum Umat Islam (FUI) Kalbar (hasil wawancara 24 Desember 2012), isu etnis dan agama memang sangat efektif dalam memobilisasi dukungan politik dalam setiap pilkada Bupati dan Gubernur di Kalimantan Barat di era reformasi saat ini. Menurut Haitami, di dalam komunitas Dayak isu dan kampanye yang bernuansakan agama juga terjadi. Perbedaannya dengan etnis Melayu, kalau di dalam komunitas

etnis Dayak mereka lakukan secara lebih tertutup, terprogram dan persatuannya lebih kuat. Sedangkan dalam komunitas etnis Melayu isu agama dilakukan secara terbuka, namun dalam perjuangannya tidak terprogram dan persatuannya tidak terlalu kuat seperti yang terjadi dalam komunitas etnis Dayak dan komunitas Kristen.

<sup>17</sup> Menurut Elyakim Simon Djalil, mantan Bupati Kabupaten Sintang dan tokoh masyarakat etnis Dayak (hasil wawancara tanggal 15 November 2012), tidak bisa dipungkiri bahwa era reformasi dan otonomi daerah merupakan era kejayaan beberapa elit masyarakat Dayak dalam meraih

## Faktor-faktor Munculnya Politik Identitas Etnis

Dalam banyak kasus, kajian ilmu politik yang coba melihat negara-negara yang berada dalam tahap menuju demokrasi terkonsolidasi (*consolidated democracy*), proses restorasi identitas etnis dan agama biasanya bercampur baur dengan masalah-masalah yang khusus terjadi di era transisi menuju rezim yang demokratis. Menurut Snyder (2000), hampir seluruh konflik etnis yang terjadi selama tahun 1990-an terjadi di negara-negara demokrasi baru.<sup>18</sup> Kecenderungan yang terjadi dengan terbukanya jalan demokratisasi secara otomatis juga seringkali memberi ruang bagi munculnya masalah-masalah dasar mengenai identitas. Dalam perspektif liberal, identitas dalam konteks hubungan antara individu dengan masyarakat bukanlah suatu hal yang rumit, karena setiap individu mempunyai ciri atau sifat yang sama sehingga menjadikan mereka mempunyai simbol atau identitas sebagai anggota pada suatu kelompok tertentu dalam masyarakat (Rouse, 1995). Namun pada perkembangannya, kajian budaya memberikan pandangan yang berbeda. Identitas dilihat sebagai suatu proses pembentukan atau konstruksi sosial yang tidak stabil, berlaku dalam suatu

---

kekuasaan politik di daerah. Sebuah penantian politik yang cukup lama bagi masyarakat Dayak telah berlalu, karena setelah Oevang Oeray menjadi gubernur pada tahun 1960-1966, tidak pernah lagi ada orang Dayak yang bisa menjadi gubernur.

<sup>18</sup> Snyder, Jack. (2000). *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*. New York: Norton. Snyder menjelaskan bahwa beragam fakta menunjukkan adanya hubungan antara demokratisasi dan konflik yang disulut oleh nasionalisme. Sejalan dengan semakin banyaknya orang memainkan peran yang lebih besar dalam politik, maka bertambah besar pula kemungkinan konflik SARA (Suku, Agama dan Ras) di dalam suatu negara. Studi sistematis mengenai semua konflik SARA yang terjadi pada 1990 hingga 1998 menunjukkan bahawa tuntutan politik bernuansa SARA memuncak selama masa transisi menuju demokrasi atau Negara-negara yang mengalami kemajuan tanggung (*partial*) dalam kebebasan politik atau kebebasan sipil.

jaringan hubungan kekuasaan (Nonini dan Ong, 1997). Oleh karena itu, identitas tidak harus dilihat sebagai inti yang tidak berubah karena identitas berhubungan dengan banyak faktor.

Transisi demokrasi di Indonesia yang diiringi dengan pemberian desentralisasi dan otonomi yang luas kepada daerah, dalam praktiknya juga menimbulkan masalah politik baru. Pada waktu yang bersamaan, ketika *space* demokratisasi tersebut dibuka, nilai-nilai sosial dan budaya yang mengedepankan semangat toleransi dan kebersamaan yang di pelihara secara *artificial* oleh rezim Orba seakan tergradasi oleh euforia otonomi dan kebebasan. Konflik sosial yang didasarkan pada perbedaan suku dan agama di tengah masyarakat seakan linier dengan proses demokrasi yang dibangun di era reformasi. Kebebasan dan keterbukaan yang menjadi pilar dalam proses demokratisasi seakan menjadi sumber munculnya sentimen kedaerahan dan kesukuan. Politik identitas yang didasarkan pada etnis dan agama dalam setiap proses rekrutmen pemimpin di daerah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dinamika politik lokal, seperti di Kalbar khususnya.

Secara umum, fenomena terfragmentasinya masyarakat dalam era transisi demokrasi bukan saja terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara yang multi-etnis seperti Britania, Afrika, Asia, dan negara-negara pecahan Uni Soviet. Hasil penelitian Rupesinghe (1996)<sup>19</sup>, Snyder (2000)<sup>20</sup>, dan

<sup>19</sup> Rupesinghe, Kumar. (1996). *Governance and Conflict Resolution in Multi-Ethnic Societies*, dalam Kumar Rupesinghe and Valery A. Tishkov, *Ethnicity and Power in Contemporary World*. Tokyo: United Nations University Press, hlm. 23. Dalam kajiannya mengenai kebangkitan primordialisme di negara-negara pecahan Uni Soviet, Rupesinghe sampai pada sebuah kesimpulan bahwa demokratisasi merupakan paradoks, di satu sisi memberikan kebebasan dan hak-hak politik rakyat, namun pada sisi yang lain turut memicu munculnya kesadaran primordialisme dalam bentuk kebangkitan etnis dan fundamentalisme agama.

<sup>20</sup> Ibid (2000), Hasil kajian Snyder di beberapa negara seperti Britania, Afrika, Asia, dan negara-negara

Smith (2001)<sup>21</sup> menunjukkan bahwa negara yang masyarakatnya plural, baru keluar dari sebuah rezim otoriter dan menuju sistem demokrasi, akan selalu menghadapi masalah-masalah kebangkitan primordialisme dan konflik SARA. Walaupun kajian Snyder (2000) tidak fokus ke Indonesia, namun fenomena implikasi dari transisi demokrasi terhadap munculnya masalah tersebut terjadi juga di berbagai daerah di Indonesia, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini. Dalam kondisi paradoks sedemikian, pertanyaan yang relevan untuk dijawab adalah faktor apa sajakah yang menyebabkan munculnya sentimen primordial di era demokratisasi saat ini di tingkat lokal, khususnya di Kalimantan Barat? Fenomena kebangkitan primordialis (*primordialist revival*), baik dalam konteks etnis maupun agama dalam masyarakat majemuk, telah menjadi pusat perhatian kalangan ilmuwan politik ketika pertikaian antar etnis terjadi di beberapa negara. Pertikaian antar etnis yang terjadi di bekas negara Uni Soviet, Semenanjung Balkan, beberapa wilayah di Afrika dan Asia Selatan memberi sebuah gambaran akan perlunya pemahaman terhadap pentingnya primordial dan masalah identitas dalam kehidupan politik (Rupesinghe: 1996; Horowitz: 1994).<sup>22</sup>

pecahan Uni Soviet menunjukkan bahwa tuntutan politik SARA memuncak selama masa transisi menuju demokrasi. Masa transisi tersebut di negara yang sedang berkembang dapat menjurus ke salah satu bentuk nasionalisme yaitu; sipil, SARA, revolusioner, dan kontra revolusioner.

<sup>21</sup> Anthony D Smith. (2001). *Nationalism, Theory, Ideologi, History*. UK : Published by Arrangement with Blacwell Publishing Ltd, Oxford. Menurut Smith, dalam dekade terakhir ini hampir sebagian dari negara-negara yang berada di Yugoslavia, Kaukasus, anak benua India dan Timur Tengah selalu dipicu dan ditentukan oleh sentimen etnis dan aspirasi nasionalis yang kuat, yang berujung pada konflik yang banyak menimbulkan korban jiwa dan harta benda.

<sup>22</sup> Horowitz, Donald L. (1994). *Democracy in Divided Societies*, dalam Larry Diamond dan Marc F. Plattner. *Nationalism, Ethnic Conflict and Democracy*. Maryland: The Johns Hopkins University Press. Horowitz menjelaskan bahwa demokratisasi

Pada konteks transisi menuju demokrasi, terdapat beberapa pandangan yang menjelaskan fenomena bangkitnya identitas etnis dan agama. Menurut pandangan yang bersifat struktural-konstruktif, kebangkitan sentimen primordial yaitu suku dan agama pada dasarnya juga berhubungan dengan masalah ketidakadilan distribusi ekonomi (Cornell, Stephen dan Hartmann, Douglas, 1998: 13).<sup>23</sup> Namun, kasus menguatnya politik identitas etnis di Kalbar pasca rezim Orba tak cukup hanya dikaji dengan suatu pendekatan struktural-konstruktif. Peran pemimpin formal dan informal tingkat lokal yang mendapat dukungan dari elit nasional, juga merupakan faktor utama yang mendorong bangkitnya sentimen kesukuan dalam dinamika politik di daerah saat ini. Demokratisasi, keterbukaan, dan otonomi daerah menjadi momentum bagi kekuatan-kekuatan elit di daerah untuk membangun simbol-simbol kultural dan kesukuan yang mencerminkan kearifan lokal (*local wisdom*), yang muaranya adalah untuk mendapatkan sumber-sumber kekuasaan.

Sesuai dengan perspektif konstruksi sosial menurut Shamsul (1996),<sup>24</sup> pembentukan identitas adalah suatu fenomena sosial dan dapat dipahami dengan melihatnya dalam konteks dua realita sosial. Pertama, realita *authority defined*, yaitu realita yang didefinisikan oleh pihak yang berada dalam struktur kekuasaan dominan. Kedua, realita *everyday defined*, yaitu realita yang dialami sendiri oleh individu dalam

merupakan gerakan yang mendunia, tetapi di tempat dimulainya tidak universal dan tidak berhasil dengan seragam. Terdapat banyak alasan mengapa demokratisasi dan demokrasi mengalami kegagalan. Pada banyak negara di Afrika, Asia, Eropa Timur, dan bekas Uni Soviet alasan utamanya adalah konflik etnis.

<sup>23</sup> Cornell, Stephen, dan Hartmann, Douglas. (1998). *Ethnicity and Race: Making Identities in A Changing World*. Thousand Oaks, London, New Delhi: Pine Forge Press, hlm. 13.

<sup>24</sup> Shamsul A.B. (1996). *Debating about Identity in Malaysia: A Discourse Analysis*. Southeast Studies 34 (3).

kehidupan sehari-harinya. Kedua realita tersebut ada, beriringan setiap waktu, dan saling mempengaruhi.

Munculnya keinginan untuk mewujudkan identitas kelompok mungkin datang dari internal kelompok itu sendiri, dimotivasi oleh dorongan kekitaan, rasa gotong-royong, keistimewaan diri atau komunalisme. Namun yang sering terjadi, menurut Shamsul (2000)<sup>25</sup> merupakan hubungan timbal-balik pengaruh luar dan dalam, yang terjadi serentak akibat faktor sejarah, politik, ekonomi, agama, dan lain-lain.

Fenomena politik identitas dan tuntutan akan perimbangan keterwakilan politik berdasarkan kelompok etnis di Kalbar, sesungguhnya memiliki sejarah panjang, yang lebih banyak dipraktikkan oleh komunitas Dayak ketimbang Melayu yang mempunyai posisi politik lebih kuat. Fenomena tersebut semakin tampak di era otonomi daerah saat ini. Kalangan elit Dayak menganggap saat ini adalah waktu yang tepat bagi komunitas mereka untuk mendapat kekuasaan politik, dengan menduduki berbagai posisi penting di daerah. Mereka beranggapan era Orba tidak memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat lokal, khususnya orang-orang Dayak untuk menduduki posisi-posisi

strategis tersebut. Pemerintah pusat membatasi aktivitas tokoh Dayak dalam politik dan pemerintahan, menggantikannya dengan figur militer dari Jawa. Orde Baru pada dasarnya adalah masa gelap dan kontemplasi serta konsolidasi bagi Dayak (Amirrachman, 2007:28).

Keadaan ini sebenarnya dirasakan pula oleh orang-orang Melayu, meski secara politik sedikit lebih untung karena masih ada yang diberi kepercayaan untuk memimpin dan memegang posisi strategis di birokrasi, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, ekspresi perjuangan politik etnis Dayak untuk mendapatkan kekuasaan agak lebih keras jika dibandingkan dengan etnis Melayu. Salah satu contohnya di masa akhir pemerintahan Orba adalah terjadinya peristiwa pembakaran gedung DPRD di Mempawah dan protes mereka terhadap proses pemilihan Bupati Sanggau pada tahun 1998. Melalui Majelis Adat Dayak (MAD), elit-elit kelompok Dayak melakukan gerakan penolakan terhadap Kolonel Sumitro, seorang anggota militer berasal dari etnis Jawa, yang dicalonkan sebagai Bupati Sanggau, pada waktu itu di dukung oleh militer dan Gubernur Kalbar Aspar Aswin.

Berbagai bentuk perjuangan yang lebih agresif dan menggunakan ancaman kekerasan tersebut, pada banyak kasus memang membawa keberhasilan untuk elit etnis tersebut, Cornelis Kimha berhasil terpilih menjadi Bupati Kabupaten Pontianak. Pada tahun yang sama Yacobus Luna, salah seorang birokrat senior, juga menang dalam pemilihan Bupati di Kabupaten Bengkayang, sebuah kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Sambas. Begitupun di Kabupaten Landak dengan mayoritas penduduknya adalah etnis Dayak, pasangan Cornelis dan Nikodimus Nehen yang berasal dari etnis Dayak berhasil terpilih menjadi bupati dan wakil bupati. Puncak keberhasilan

<sup>25</sup> Shamsul A.B. (2000, 12 September). *Pembentukan Identity sebagai Fenomena Sosial Satu Komentar Konseptual dan Empirikal*. Makalah seminar "Mencermati Fenomena Dayak Islam di Kalimantan Barat", anjuran STAIN, Pontianak, Indonesia. Menurut beliau, dalam situasi perubahan dan krisis sosial yang dialami dapat membuka ruang dan suasana yang cukup subur di akar rumput. Setiap individu dalam kelompok sosial dapat memunculkan ide dan wacana tentang pembentukan identitas kolektif sebagai suatu benteng sosial bersifat kekitaan. Sehingga dalam situasi seperti itu kelompok sosial yang terlibat, dengan sadar dapat mencari dan membina identitas kolektif kelompok masing-masing guna mengukir *niche* dan kedudukan dalam masyarakat. Untuk tujuan itu ada yang menggunakan faktor ras, suku, agama, dan ada yang menggunakan faktor jenis kelamin.

perjuangan ini ialah terpilihnya Cornelis sebagai Gubernur Kalbar tahun 2008.

Berbagai gerakan politik elit Dayak yang agresif ternyata mendapat reaksi dari elit Melayu, yang merasa eksistensinya sebagai bagian dari penduduk asli terancam. Maka, orang-orang Melayu merasa perlu menandingi gerakan politik Dayak tersebut (Davidson, 2003:346). Sikap *low profile* dan tidak frontal yang ditunjukkan elit Melayu, yang berhimpun dalam Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), serta lemahnya solidaritas di kalangan elit dan antara elit dengan masyarakat Melayu, menjadi salah satu sumber gagalnya elit Melayu bersaing dengan elit Dayak dalam memperebutkan kepemimpinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Berbeda dengan elit Melayu, elit Dayak mampu menjadikan Majelis Adat Dayak (MAD) sebagai wadah untuk membangun identitas dan solidaritas etnisnya secara masif sampai ke akar rumput. Keberanian elit Dayak untuk menanggung akibat dari tindakan agresif tersebut, menjadi sumber bangkitnya dukungan masyarakat etnis Dayak untuk bertindak lebih berani.

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan diatas, apabila dilihat dalam perspektif instrumentalisme maka ada empat faktor yang mempengaruhi munculnya politik identitas etnis dan agama di Kalbar. Pertama, faktor struktural dan momentum, sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah Orba yang cenderung tidak adil dan memarginalkan masyarakat asli, serta munculnya reaksi terhadap kebijakan pembangunan yang tidak seimbang. Momentum kebebasan politik dan otonomi daerah, menjadikan kelompok masyarakat lokal semakin berani untuk menuntut hak-hak sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Realitanya, reaksi yang agresif dalam menuntut hak-hak tersebut lebih banyak dilakukan oleh etnis Dayak daripada Melayu. Kedua adalah keterwakilan

kepemimpinan politik yang tidak seimbang. Tidak proporsionalnya keterwakilan etnis dan agama pada jabatan penting di daerah selama ini, seperti gubernur, bupati, dan di birokrasi menjadikan elit kedua etnis bersaing menuntut hak yang sama dan ingin mempertahankan posisi politik yang telah diperoleh.

Ketiga adalah adanya persekongkolan politik antara elit lokal dan pusat dalam membangkitkan isu etnis dan agama. Munculnya politik identitas etnis dan agama dalam kasus pemilihan gubernur tahun 2007 misalnya, sangat berhubungan dengan kemampuan elit lokal dan pusat dalam menggunakan simbol etnis dan agama untuk meraih dukungan politik. Kerjasama tersebut lebih banyak memainkan simbol-simbol agama dengan memperkuat perbedaan antara pemimpin nonmuslim dengan muslim. Peran organisasi adat, keagamaan, dan NGO pun sangat menentukan, terutama atas keberhasilan pasangan etnis Dayak.

Selain itu, kekuatan Cornelis sebagai simbol kekuatan masyarakat Dayak dalam pemilukada gubernur juga didukung oleh beberapa aktivis Dayak, yang berhimpun di beberapa organisasi sosial dan keagamaan, NGO seperti Institut Dayakologi, Pergerakan Cendekiawan Dayak, Ikatan Sarjana Katolik, Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI), Credit Union, Kepastoran, Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT), dan beberapa lembaga sosial dan pembangunan masyarakat lainnya. Keadaan ini jauh berbeda dengan apa yang terjadi dalam komunitas etnis Melayu, di mana selain tidak adanya kekuatan NGO dan juga terfragmentasinya kekuatan politik elit-elit Melayu. Penyatuan kekuatan umat Katholik dan Protestan dalam memberikan dukungan kepada pasangan Cornelis-Christiyandi Sanjaya, merupakan faktor utama menjadi simbol perjuangan etnis Dayak dan etnis China di Kalbar.

Faktor keempat adalah munculnya prasangka dan stereotip etnis. Sebagian besar orang Dayak berpandangan, jika orang Melayu yang berkuasa dan memimpin, maka ia akan lebih mementingkan etnisnya dan orang-orang yang beragama Islam saja. Sebaliknya, orang Melayu juga beranggapan jika orang Dayak yang berkuasa dan memimpin, maka akan terjadi Kristenisasi jabatan-jabatan penting di birokrasi pemerintahan.

### Pengaruhnya terhadap Keamanan Komunitas

Salah satu bentuk dari fungsi integrasi politik yang dimiliki oleh pemerintah adalah membangun sebuah konfigurasi politik akomodatif, yang merepresentasikan keterwakilan kelompok etnis dominan dan memfasilitasi komunikasi sosial berbagai etnis yang ada di wilayah kekuasaannya. Kebijakan politik tersebut penting dibuat sebagai satu upaya untuk menciptakan harmonisasi sebagai salah satu pilar yang menopang tegaknya integrasi sosial, politik, dan keamanan komunitas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dahl dan Forbes (dalam Diamond dan Plattner, 1994: 22a-23a), akan pentingnya praktik dan pengertian yang akomodatif dari kelompok elit dalam membangun suatu sistem “keamanan timbal balik”, yang menjamin derajat perlindungan minimal bagi kepentingan dasar setiap kelompok yang bersaing, sehingga kekalahan tidak dianggap dikucilkan daripada kekuasaan dan sumber daya.

Walaupun secara sosial hubungan antara etnis Dayak dan Melayu tidak tampak konfliktual, namun adanya etnisitas dan agama dalam persaingan politik berpengaruh pada munculnya jarak hubungan etnis di masyarakat akar rumput, yang ditandai dengan tingginya saling curiga dalam setiap agenda pemilukada. Pasca pilkada, jarak sosial dan kecurigaan

antara elit politik terjadi terus-menerus. Sedangkan pada masyarakat bawah, ketegangan di antara kelompok etnis sebagai akibat kompetisi politis berkorelasi dengan rasa keamanan di komunitasnya.

Sebagai konsekuensi dari kuatnya persaingan politik tersebut, keamanan komunitas (*community security*) saat ini selalu dihubungkan dengan besar kecilnya keterwakilan politik etnis dalam kepemimpinan politik dan birokrasi di pemerintahan daerah. Dinamika sosial dan politik pemilukada gubernur dan bupati/walikota di beberapa kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, yang berdasarkan etnis dan agama, bisa menjadi instrumen politik penting dalam persaingan politik dan keamanan. Persaingan politik tersebut memang berbeda pengaruhnya terhadap aspek keamanan masyarakat, hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, pertama, besarnya perbandingan komposisi penduduk dari etnis Dayak dan Melayu yang tinggal dalam suatu wilayah kabupaten dan kecamatan tersebut.

**Tabel 1.**  
**Perbandingan Persentase Jumlah Etnis Dayak dan Etnis Melayu di Empat Belas Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat**

No	Kabupaten	Etnis Dayak (%)	Etnis Melayu (%)
1	Sambas	6,60	90,53
2	Bengkayang	70,28	25,32
3	Landak	83	17,07
4	Pontianak	14,68	75,25
5	Sanggau	74,15	28,25
6	Ketapang	34,09	65,43
7	Sintang	59,33	33,71
8	Kapuas Hulu	47,48	51,96
9	Sekadau	63,76	34,24
10	Melawi	47,63	51,35
11	Kayong Utara	5,62	89,56
12	Kubu Raya	13,27	83,09
13	Kota Pontianak	6,45	57,33
14	Kota Singkawang	8,19	37,63

Sumber: Kalbar Dalam Angka Tahun 2011. Data sudah diolah penulis.

Semakin kecil jumlah komunitas etnisnya, maka semakin besar potensi ancaman keamanan yang dialami, sebaliknya semakin besar komposisi etnisnya, maka semakin terjamin keamanan komunitasnya. Menurut Gusti Suryansyah yang juga merupakan Sultan dari Kerajaan Melayu Landak<sup>26</sup>, bagi masyarakat Melayu minoritas yang bermukim di dalam komunitas Dayak, perasaan terancam itu seringkali muncul. Aspek keamanan terkadang menjadikan masyarakat Melayu Landak tidak terlalu berani terlibat secara terbuka dalam persaingan politik dengan etnis Dayak, fenomena yang sama juga dirasakan oleh masyarakat Melayu di pedalaman Kabupaten Melawi. Menurut Syahdan Amri<sup>27</sup>, sebagai minoritas, masyarakat Melayu di pedalaman Melawi tidak terlalu berani terang-terangan membangun persaingan politik di setiap even pilkada, karena menyangkut aspek keamanan masyarakatnya. Keadaan ini juga terjadi dalam komunitas etnis Dayak di Kabupaten Sambas yang penduduknya mayoritas etnis Melayu. Minoritasnya komposisi etnis Dayak menjadikan mereka tidak berani secara terbuka bersaing dengan etnis Melayu dalam setiap pilkada.

Kedua, faktor karakteristik masyarakat. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pedalaman memiliki karakter yang berbeda, begitu juga dengan masyarakat yang wilayahnya seringkali dilanda konflik sosial dengan yang tidak.<sup>28</sup> Dalam konteks

persaingan politik tersebut, keamanan komunitas kelompok etnis juga dimaknai jika pemimpin daerah dapat dikuasai, sehingga akan berpengaruh pada terwujudnya dominasi sosial, budaya, dan politik. Adanya dominasi tersebut akan berhubungan langsung dengan terkontrolnya keamanan kelompok etnisnya. Kuatnya persaingan politik berdasarkan etnis dan agama di Kalbar tersebut telah mengancam keamanan masyarakat. Prinsip *Democratic Stability* sebagai sebuah prinsip untuk mencapai suatu keamanan dan kedamaian belum sepenuhnya berlaku di Kalimantan Barat.

Dampak dari dinamika politik yang makin kompetitif di Kalbar tersebut, pada praktiknya mewujudkan politik *power sharing*, sebuah konfigurasi politik akomodatif yang merepresentasikan keterwakilan kelompok etnis dominan dan memfasilitasi terjadinya komunikasi sosial di antara berbagai etnis yang ada di wilayah kekuasaannya. Di Kalbar, pembagian kekuasaan di daerah secara proporsional antara kedua etnis di beberapa kabupaten seperti Kapuas Hulu, Ketapang, dan Melawi dapat membuat masyarakat dari kedua etnis yakin akan terjaminnya keamanan komunitas mereka.

Berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Landak, Bengkayang, Sintang, dan Sekadau, komunitas Melayu tidak mendapat tempat yang signifikan dalam kekuasaan sehingga keamanan komunitasnya merasa terancam. Tindakan politik yang masih mengakomodasi kelompok etnis dilakukan guna meredam berbagai gejolak sosial dan politik, yang dapat mengarah kepada konflik sosial. Pembagian kekuasaan dalam jabatan politik dan institusi-institusi lainnya dalam masyarakat heterogen, memang merupakan salah satu cara dari pengelolaan konflik dan menjaga keamanan masyarakat di daerah.

Sebagian besar ilmuwan politik berpendapat, bahwa satu-satunya cara untuk

<sup>26</sup> Hasil wawancara 10 Desember 2012

<sup>27</sup> Hasil wawancara 10 Oktober 2012

<sup>28</sup> Di Kabupaten Landak, Bengkayang, dan Sambas yang merupakan daerah kategori rawan konflik di Kalbar, tingkat keamanan dari komunitas etnis minoritas dalam setiap persaingan politik pilkada bupati dan gubernur sangat terancam. Penerapan hukum adat yang terkadang dipolitisir oleh beberapa oknum dan tidak sesuai dengan aturan adat sebenarnya, membuat masyarakat Melayu dan etnis pendatang lainnya merasa terancam keamanannya, terlebih jika isu-isu etnis dan agama mengemuka dalam setiap pemilihan bupati dan gubernur.

mempertahankan sebuah masyarakat multi-etnis dari perpecahan adalah diperlukan institusi politik formal yang mampu menjamin kesepakatan dalam proses rekrutmen dan pembagian kekuasaan secara demokratis, serta dapat mengakomodir pluralitas dalam masyarakat. Pola pembagian kekuasaan di Kalbar memang tidak menerapkan demokrasi *consociationalisme* seperti konsep Lijphart (1977), karena secara politis yang diakomodasikan bukan kekuatan-kekuatan institusi politik formal seperti partai politik, akan tetapi pada penentuan kepemimpinan daerah dan jabatan-jabatan di birokrasi pemerintahan di tingkat lokal. Politik akomodasi dengan pembagian kekuasaan berdasar representasi kelompok etnis inilah yang saat ini terjadi di beberapa kabupaten dan menjadi kesepakatan politik guna membangun integrasi sosial masyarakatnya.

Dalam hubungannya dengan keterwakilan politik tersebut, Timothy D. Sisk (dalam Harris dan Reilly, 2000: 141-144) berpendapat bahwa, mencegah perpecahan adalah dengan menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang memungkinkan komunitas yang ada untuk berbagi kekuasaan. Sistem politik dengan pembagian kekuasaan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu pembuatan kebijakan idealnya melalui konsensus, dan kedua, semua kelompok etnis mayoritas dilibatkan dalam pemerintahan, untuk kelompok minoritas terutama dijamin pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan mengenai isu-isu sensitif. Kemudian menurut Timothy, ada dua pendekatan utama dalam mekanisme pembagian kekuasaan dalam masyarakat multi-etnis. Pertama, pendekatan "fondasi kumpulan", yaitu adanya akomodasi oleh para pemimpin etnis di pusat politik dan adanya jaminan otonomi kumpulan dan hak-hak minoritas. Kedua, pendekatan integratif, yaitu pendekatan yang menolak menggunakan kelompok

etnis sebagai bahan penyusunan masyarakat bersama.

Mengacu pada pandangan Sisk, maka dalam praktiknya pembagian kekuasaan di Kalbar lebih pada pendekatan fondasi kelompok etnis, bukan dengan fondasi yang integratif. Pendekatan tersebut lebih mampu menciptakan implikasi politik yang kondusif untuk membangun integrasi sosial di beberapa kabupaten. Mengakomodasi keterwakilan kelompok etnis dalam kepemimpinan di daerah menjadi faktor utama dalam menjaga keamanan dan stabilitas sosial politik masyarakat. Oleh karena itu, membangun konfigurasi keterwakilan etnis Melayu dan Dayak dalam kepemimpinan di beberapa kabupaten masih selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap pemilihan kepala daerah. Pembagian kekuasaan dengan sistem *power sharing* antara etnis dominan dapat lebih "memuaskan" dan "meredakan" ketegangan antarkelompok etnis.

### Kesimpulan

Sejak runtuhnya Orba tahun 1998, Indonesia berjuang menerapkan sistem demokrasi dan otonomi yang luas ke daerah. Namun, di saat yang bersamaan, demokratisasi juga memunculkan masalah-masalah sosial dan politik di daerah, persaingan politik di daerah cenderung terfragmentasi pada sentimen identitas etnis dan agama. Isu-isu etnis dan agama dijadikan instrumen oleh elit untuk memobilisasi dukungan politik dari kelompok etnisnya, untuk menggelorakan semangat mengubah keadaan kelompok etnisnya menjadi lebih baik secara sosial, ekonomi, dan politik.

Pendekatan instrumentalis turut menyumbang pemahaman politik identitas di Kalbar, karena secara teoretis pendekatan ini menjelaskan kompetisi berbagai kelompok etnis dalam politik, pemimpin

etnis selalu menggunakan kelompok budaya sebagai instrumen untuk memobilisasi massa dalam persaingan politik. Penelitian ini menemukan bahwa faktor penyebab meningkatnya penggunaan politik identitas etnis dan agama lebih disebabkan oleh situasi politik yang lebih terbuka, adanya proses marginalisasi politik, perasaan terancam dari etnis pendatang, tidak berimbanginya keterwakilan politik, dan muaranya adalah persaingan elit politik dari kedua etnis, Dayak dan Melayu, yang menjadikan etnis dan agama sebagai instrumen politik mereka. Dampak dari dinamika politik yang semakin kompetitif di Kalbar tersebut, memunculkan politik berbagi kuasa sebagai sebuah konfigurasi politik akomodatif, yang merepresentasikan keterwakilan kumpulan etnis dominan yang ada di wilayah kekuasaannya.

Dalam konteks persaingan politik antara etnis Dayak dan Melayu, keamanan komunitas etnisnya saat ini mereka pahami apabila kepemimpinan daerah mampu mereka dapatkan maka akan berpengaruh pada terwujudnya dominasi politik. Sebagai konsekuensi dari pemaknaan keamanan komunitas, dengan besar-kecilnya keterwakilan etnis dalam kepemimpinan politik dan institusi birokrasi, maka persaingan politik untuk mendapatkan posisi yang lebih besar menjadi sangat penting. Dalam persaingan seperti itu, etnis dan agama tidak hanya sekadar dijadikan isu, namun menjadi instrumen penting untuk menjamin kepentingan dan keamanan komunitasnya. *Democratic Stability* sebagai sebuah prinsip untuk mencapai suatu keamanan dan kedamaian komunitas etnis, sulit untuk diwujudkan di Kalimantan Barat selama persaingan politik masih diasaskan kepada etnis dan agama.

## Daftar Pustaka

- Amirrachman, Alpha. (Ed)/ 2007. *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso*. International Center for Islama and Pluralist (ICIP). Jakarta.
- Asmu'ie, Achyar dan Jumadi. (2006). *Integrasi Politik di Kalimantan Barat: Studi Kasus Kabupaten Ketapang*. Hasil penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
- A.B, Shamsul. (1996). *Debating About Identity in Malaysia: A Discourse Analysis*. Southeast Studies 34 (3).
- A.B, Shamsul. (2000, 12 September). *Pembentukan Identity sebagai Fenomena Sosial Satu Komentar Konseptual dan Empirikal*. Makalah seminar "Mencermati Fenomena Dayak Islam di Kalimantan Barat", anjuran STAIN, Pontianak, Indonesia.
- Babbie, Earl & Benaquisto, Lucia. (2010). *Fundamentals of Social Research*. Nelson Education.
- Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. (2011). *Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2011*.
- Banton, Michael. (1983). *Racial and Ethnic Cmpetition*. Cambridge University Press.
- Barth, Fredrik. (Ed)/ 1969. *Ethnic Groups and Boundaries*. Boston: Little, Brown, and Co.
- Bertrand, Jacques. (2004). *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. England: Cambridge University Press, Cambridge.
- Beyme, Klaus von. (1996). *Biopolitical Ideologies and Their Impact in The New Social Movements*. Dalam *Biopolitic*,

- The Politics of The Body, Race and Nature*. Agnes Heller dkk (eds). Brookfield, USA: Avebury.
- Bourchier, David & Hadiz, R. Vedi. (2003). *Indonesian Politics and Society: A Reader*. Routledge-Curzon.
- Brass, Paul. (1979). Elite Groups, Symbol Manipulation, and Ethnic Identity among the Muslim of North India. Dalam David Taylor dan Malcolm Yapp (eds). *Political Identity in South Asia*. London and Dublin: Curzon Press.
- Breuilly, John. (1993). *Nationalism and the State* (Edisi ke-2). Manchester: Manchester University Press.
- Cornell, Stephen & Hartmann, Douglas. (1998). *Ethnicity and Race: Making Identities in a Changing World*. Pine Forge Press. Thousand Oaks, London, New Delhi.
- Dahl, Robert A. (1992). *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. Terjemahan oleh A. Rahman Zainuddin. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Dahl, Robert A. (1982). *Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs Control*. New Haven and London: Yale Universiti Press.
- Davidson, Jamie Seth. (2002). *Violence and Politic in West Kalimantan, Indonesia*. Disertasi Doktor, University Washington.
- Diamon, Larry. (1994). *Revolusi Demokrasi Perjuangan untuk Kebebasan dan Pluralisme di Negara Sedang Berkembang*. Terjemahan Yayasan Obor Indonesia.
- Erb, Maribeth & Sulistiyanto, Priyambudi (edited). (2009). *Deepening Democracy In Indonesia: Direct Elections For Local Leaders*. Singapore: Institut Of South Asian Studies.
- Gupta, Suman. (2007). *Social Constructionist Identity Politics and Literary Studies*. New York: Palgrave Macmillan.
- Gurr, Ted Robert. (1993). *Minorities at Risk: A Critical View of Ethnopolitical Conflicts*. Washington DC: United States Institute of Peace Press.
- Harris, Peter & Reilly, Ben. (1998). dalam *Democracy and Deep-Rooted Conflict: Options for Negotiators*. International IDEA.
- Horowitz, Donald L. (1994). Democracy in Divided Societies, dalam Larri Diamond & Marc F. Plattner. *Nationalism, Ethnic Conflict, and Democracy*. Maryland: The Johns Hopkins University Press.
- Katzenstein, Peter. (1996). *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. New York: Colombia University Press, hlm. 59.
- Klinken, Gerry Van. (2005). Pelaku Baru, Identiti Baru: Kekerasan antar Suku pada Masa Pasca Soeharto di Indonesia. *Konflik Kekerasan Internal Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Yayasan Obor Indonesia.
- Lake, D.A. & Rothchild, D. (1998). *The International Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diffusion and Escalation*. New Jersey: Princeton University Press.
- Lijphart, Arend. (1977). *Democracy and Plural Societies: A Comparative Exploration*. New Haven: Yale.
- Lingkaran Survey Indonesia (LSI). Laporan Kajian LSI Edisi 09 Januari 2008 dan Edisi 10 Februari 2008.
- Nancy, Rosenblum L. (2003). Religious Parties, Religious Political Identity, and the Cold Shoulder of Liberal Democratic Thought. *Journal Ethical Theory and Moral Practice* 6: 23-53. Kluwer Aca-

- demic Publisher, Printed in the Netherlands.
- Nonini, D.M. dan Ong.A. (1997). Chinese Transnationalism as an Alternative Modernity. *Ungrounded Empires: The Cultur Politics of Modern Chinese Transnationalism*.
- Nordholt, Henk Schulte Henk dan Klinken, Van Gerry. (Eds)/ 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Oyugi, O. Walter. (1997). *Ethnicity in the Election Process: The 1992 General Election in Kenya*. African Association of Political Science.
- Posner, Daniel N. (2005). *Institution and Ethnic Politics in Africa*. New York: Cambridge University Press.
- Rex, John dan Drury, Beatrice. (Eds)/ 1993. *Ethnic Mobilization in A Multicultural Europe*. Brookfield: Avebury.
- Rouse R .(1995). Question of Identity: Personhood and Collectivity in Transational Migration to the United States. *Critique of Anthropology* 15:351-380.
- Rupesinghe, Kumar.(1996). Governance and Conflict Resolution in Multi-Ethnic Societies. Dalam Kumar Rupesinghe and Valery A. Tishkov. *Ethnicity and Power in Contemporary World*. Tokyo: United Nations University Press.
- Smith, Anthoni D. (2001). *Nationalism, Theory, Ideologi, History*. Published by Arrangement with Blacwell Publishing Ltd, Oxford, UK.
- Snyder, Jack. (2000). *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*. New York: Norton.
- Tadjbakhsh, Shahrbanou & M.Chenoy, Anuradha. (2007). *Human Security Concepts and Implications*. London: Routledge.
- Tanasaldy, Taufiq. (2007). Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat. Dalam Nordholt, Henk Schulte Henk & Klinken, Van Gerry. (Eds)/ 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yok Fee, Lee. (2007). Subjektiviti dan Identiti Orang Cina di Malaysia: Lokal dan Global. Dalam Alisjahbana, Armida S dkk (Eds). *Indonesia dan Malaysia dalam Era Globalisasi dan Desentralisasi: Mewujudkan Kemakmuran Bersama*. Universitas Padjajaran dan Universiti Kebangsaan Malaysia.

## **PERSYARATAN NASKAH UNTUK JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (JSP)**

1. Naskah yang ditulis untuk JSP meliputi hasil penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian pustaka dan artikel refleksi analisis fenomena sosial politik.
2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris. Sistematika naskah hasil penelitian adalah judul, nama penulis, abstrak disertai kata kunci, pendahuluan, metode, pembahasan atau analisis, simpulan, serta daftar rujukan.
3. Naskah diketik dengan program Microsoft Word di atas kertas HVS Kuarto sekitar 5000-6000 kata dengan huruf Times New Roman ukuran 12 pts.
4. Naskah diserahkan langsung kepada redaksi atau juga dapat melalui attachment e-mail ke alamat: jspugm@gmail.com.
5. Judul artikel dalam Bahasa Indonesia tidak boleh lebih dari 14 kata, sedangkan judul dalam Bahasa Inggris tidak boleh lebih dari 12 kata. Judul dicetak dengan huruf kapital di tengah-tengah dengan ukuran huruf 14 poin.
6. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik, disertai lembaga asal, dan ditempatkan di bawah judul artikel. Dalam hal naskah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum dalam urutan pertama. Penulis utama harus mencantumkan alamat korespondensi atau e-mail.
7. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris). Panjang masing-masing abstrak 75-100 kata, sedangkan jumlah kata kunci 3-5 kata. Abstrak minimal berisi tujuan, metode, dan hasil penelitian.
8. Tabel dan gambar harus diberi judul, berspasi tunggal, nomor dan sumber harus jelas. Jika terdapat foto atau gambar, sebaiknya dalam format hitam putih.
9. Daftar rujukan hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk, dan semua sumber yang dirujuk harus tercantum dalam daftar rujukan. Sumber rujukan minimal 80% berupa pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang digunakan adalah sumber-sumber berupa artikel-artikel penelitian dalam jurnal atau laporan penelitian (termasuk skripsi, tesis, disertasi, buku, dan publikasi lainnya yang relevan). Artikel yang dimuat di JSP disarankan untuk digunakan sebagai rujukan.
10. Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik rujukan berkurung (nama akhir, tahun). Pencantuman sumber pada kutipan langsung hendaknya disertai keterangan tentang nomor halaman tempat asal kutipan. Contoh: (Laclau, 1989: 81).
11. Cek setiap rujukan artikel untuk akurasi dan pastikan setiap karya yang dikutip dalam artikel ditulis dalam Daftar Pustaka atau Rujukan. Karya-karya yang tidak dikutip, tetapi tercantum dalam Daftar Pustaka atau Rujukan akan dihilangkan oleh penyunting.
12. Daftar rujukan disusun dengan tata cara seperti contoh berikut ini dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

**Buku:**

Anderson, B. (1983). *Imagined Communities*. London: Verso.

**Buku kumpulan artikel:**

Saukah, A. & Waseso, M.G. (Eds)/ 2002. *Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah* (Edisi ke-4, cetakan ke-1). Malang: UM Press

**Artikel dalam buku kumpulan artikel:**

Curran, J. (1991). Rethinking the Media as a Public Sphere 4.

**Artikel dalam jurnal atau majalah:**

Haryanto, Ignatius. (2008). Industri media membesar, bagus untuk bisnis, tapi untuk demokrasi?. *Jurnal Sosial Demokrasi*. Vol. 3 No. 1 Edisi Juli-September.

**Artikel dalam Koran:**

Pramono, Sidik. 12 Desember 2011. Menagih Hanji (De)sentralisasi. *Kompas*, hlm. 6.

**Tulisan/berita dalam Koran (tanpa nama pengarang):**

Kompas. 8 Desember, 2011. Pemilihan Pimpinan KPK: Antara Pakta Integritas dan Independensi, hlm. 3.

**Dokumen resmi:**

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta: Depdikbud. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 1990. Jakarta: PT. Armas Duta Jaya.

**Buku terjemahan:**

Hennessy, Bernard. (1989). *Pendapat Umum*. Edisi keempat, terjemahan Amiruddin Nasution. Jakarta: Penerbit Erlangga.

**Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:**

Dhakidae, D. (1991). *The State, The Rise of Capital and the fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesia News Industry*. Disertasi PhD tidak diterbitkan, Ithaca, New York: Cornell University.

Suwannathat-Pian, K. (2004, 5-7 Februari). *Question of Identity of the Muslims in Southern Thailand, A Comparative Examination of Responses of the Sam-Sams in Satun and of the Thai Malay Muslim in the Three Provinces of Yala, Narathiwat, and Pattani to Thailand's Quest for National Identity*. Paper presented at the A Plural Peninsula: Historical Interaction among the Thai, Malays, Chinese and Others, Nakhon Si Thammarat.

**Internet (karya individual):**

Clancy, Robert. (2011). *Ethics of Democracy*. (Online). ([http://www.cooperativeindividualism.org/clancy-robert\\_ethics-of-democracy.html](http://www.cooperativeindividualism.org/clancy-robert_ethics-of-democracy.html), diakses 14 Juni 2011).

**Internet (artikel dalam jurnal online):**

Kuncoro, Mudrajad. (2011). The Global Economic Crisis and Its Impact on Indonesia's Education. *Journal of Indonesian Economy and Business (Online)*, **Volume 26, No.1, 2011** (<http://jebi.feb.ugm.ac.id/>, diakses 29 Desember 2011).

**Internet (bahan diskusi):**

Wilson, D. 20 November 2005. Summary of Citing Internet Sites. *NETTRAIN Discussion List*. (Online), ([NETRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu](mailto:NETRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu), diakses 22 November 1995)

13. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bebestari (*reviewers*) yang ditunjuk oleh penyunting menurut bidang kepakarannya. Penulis diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan (revisi) naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bebestari atau penyunting. Kepastian pemuatan atau penolakan akan diberitahu melalui alamat *e-mail* Penulis.
14. Penyunting mempunyai hak untuk mengubah dan memperbaiki ejaan, tata tulis, dan tata bahasa naskah yang dimuat.
15. Segala sesuatu yang menyangkut perizinan pengutipan atau penggunaan *software* komputer untuk pembuatan naskah atau ihwal lain yang terkait dengan HaKI yang dilakukan oleh penulis, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi tanggung jawab penuh penulis.
16. Penulis yang artikelnya dimuat akan mendapatkan honorarium dan bukti pemuatan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan cetak lepas sebanyak 5 (lima) eksemplar. Artikel yang tidak dimuat *tidak akan dikembalikan*, kecuali atas permintaan penulis.



Mohon dicatat sebagai pelanggan JSP

Nama: .....

Alamat: .....

Kode Pos: ..... Telepon/HP: ..... email: .....

Harap dikirim ..... Eksemplar JSP mulai volume ..... nomor ..... tahun .....

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar Rp. .... melalui:

- Bank Mandiri, KC Gedung Magister Yogyakarta, rekening nomor 137-0007162445 a.n. Arie Ruhyanto cq Jurnal Fisipol
- Pos wesel dengan resi nomor ..... tanggal .....

Harga:

- Harga langganan (3 edisi) untuk satu tahun termasuk ongkos kirim sebesar Rp. 125.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia
- Harga satu edisi JSP Rp. 50.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia

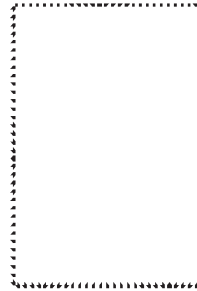
....., .....201...

(.....)

**FORMULIR INI BOLEH DIFOTOKOPI**

-----gunting dan kirimkan ke alamat Redaksi JSP atau fax ke (0274) 563362-----

**PERMINTAAN  
LANGGANAN**



Kepada: Redaksi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Gadjah Mada  
Jl. Sosio-Yustisia, Bulaksumur  
Yogyakarta 55281